

**PERBANDINGAN TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DI KABUPATEN
GROBOGAN DALM PEMILUKADA KABUPATEN GROBOGAN 2011 DAN
PEMILUKADA JAWA TENGAH 2013**

Oleh :

Adhitya Oktayudiarta Saswoyo Putra

D2B009019

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

**COMPARISON OF VOTER PARTICIPATION IN GROBOGAN IN THE
GENERAL ELECTION GROBOGAN 2011 AND GENERAL ELECTION 2013
JAWA TENGAH**

Public participation is an indicator of the quality of democracy. One of the instruments of democracy is elections. Direct the General Election is an attempt to encourage the participation of people who are pioneering the way towards the development of regional autonomy. The number of direct participation in the election Grobogan from period to period are likely unstable. Grobogan regent held the first election in 2006, and the governor election in 2008. Voter participation rates in regent election in 2006 and 2011 no more than 70%, while the participation rate in the gubernatorial election Grobogan from 2008 and lower in 2013 ie 50.64% and 46.15%.

The purpose of this study to determine differences in the level of participation on Election 2011 and Election Kab.Grobogan Central Java in 2013, also to compare the extent of involvement of community participation in Kab.Grobogan in Election 2011 and Election Kab.Grobogan Central Java in 2013 in Kab.Grobogan. The method of approach used in this study is a survey research. The collection of primary data obtained through a questionnaire through the study of literature as well as the processing and analysis of data in the form of quantitative methods.

From the research, it is known that the majority of respondents have greater voting behavior on Pilbup 2011 are 72%, whereas in 2013 only 44% pilgub. This was due to more direct Pilbup Grobogan concerning public welfare. Differences Pilbup voter turnout in 2011 with Governor Election 2013 can also be seen from the

proximity factor, in addition to the 47% of respondents argued Pilbup voting in 2011 as a candidate interested in the figure and as much as 18% due to the advice of religious leaders / community.

Researchers concluded that there are differences in the level of community participation in the election regents and governors election. Judging from some of the variables, namely the level of education, administrative reasons not listed in the DPT, attachment figure and pilgub pilbup candidates, as well as rural areas or districts of origin.

Keyword : General Election, Voter Participation, Grobogan.

ABSTRAK

PERBANDINGAN TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DI KABUPATEN GROBOGAN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN GROBOGAN 2011 DAN PEMILUKADA JAWA TENGAH 2013.

Partisipasi masyarakat merupakan indikator dari kualitas demokrasi. Salah satu instrument dari demokrasi adalah pemilukada. Pemilukada secara langsung adalah upaya untuk mendorong partisipasi rakyat yang merupakan rintisan jalan menuju pembangunan otonomi daerah. Jumlah partisipasi masyarakat pada pemilukada langsung di Kabupaten Grobogan dari periode ke periode cenderung labil. Kabupaten Grobogan menyelenggarakan pemilukada bupati pertama pada tahun 2006, dan pemilukada gubernur pada tahun 2008. Angka partisipasi pemilih pada pemilukada bupati pada tahun 2006 dan 2011 tidak lebih dari 70%, sedangkan angka partisipasi pemilukada gubernur di Kabupaten Grobogan dari tahun 2008 dan tahun 2013 lebih rendah yakni 50,64% dan 46,15%.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui perbedaan tingkat partisipasi pada Pemilukada Kab.Grobogan 2011 dan Pemilukada Jawa Tengah 2013, juga untuk membandingkan sejauh mana tingkat keterlibatan partisipasi masyarakat di Kab.Grobogan dalam Pemilukada Kab.Grobogan 2011 dan Pemilukada Jawa Tengah 2013 di Kab.Grobogan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Pengumpulan data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner melalui studi kepustakaan serta pengolahan dan analisis data berupa metode kuantitatif.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa mayoritas responden memiliki perilaku memilih lebih besar pada Pilbup 2011 yaitu 72%, sedangkan pilgub 2013 hanya 44%. Hal tersebut disebabkan karena Pilbup lebih *direct* menyangkut kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan. Perbedaan tingkat partisipasi pemilih pada Pilbup 2011 dengan Pilgub 2013 juga dapat dilihat dari faktor *proximity*, selain itu sebesar 47% responden beralasan menggunakan hak pilihnya dalam Pilbup 2011 karena

tertarik pada figur kandidat dan sebanyak 18% karena anjuran tokoh agama/masyarakat.

Peneliti menyimpulkan bahwa ada perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada bupati dan pemilukada gubernur. Dilihat dari beberapa variabel, yakni dari tingkat pendidikan, alasan administratif tidak terdaftar di DPT, figur kedekatan calon pilbup dan pilgub, serta asal daerah desa atau kecamatan.

Kata Kunci : Pemilukada, Partisipasi Pemilih, Kabupaten Grobogan.

PENDAHULUAN

Sebagai sarana demokrasi, pemilihan umum memang menjadi harapan bangsa Indonesia dalam rangka membentuk pemerintahan yang mencerminkan dan mampu melaksanakan aspirasi rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat, dalam rangka menentukan, mengatur, menyelenggarakan dan mengurus kehidupan bersama dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.¹ Pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik.

Pemilu merupakan manifestasi dari demokrasi yang sesungguhnya karena kedaulatan sudah sepenuhnya kembali ke tangan rakyat; dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan akhirnya rakyat bebas untuk menjatuhkan pilihannya bahkan tidak sedikit dana yang dibutuhkan demi

sebuah pemilihan-pemilihan pejabat politik yang *legitimate*.²

Hal tersebut juga berlaku di setiap pemilu, termasuk pemilukada.³ Sehingga legitimasi keterpilihan seorang kontestan pemilu menuntut adanya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu yang tinggi.

Perubahan sistem Pemilukada secara langsung lebih ditekankan pada upaya penegakan kedaulatan rakyat dan akuntabilitas dari kepala daerah. Dengan kata lain, akan lebih demokratis seperti yang diharapkan dan diamanatkan dalam amandemen UUD 1945 pasal 18.⁴ Dengan pemilihan langsung, DPRD Provinsi tidak lagi berwenang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi berwenang memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

¹ Suprayitno, Pemilu Indonesia dari Masa ke Masa, PT. Teguh Pratiwi Mandiri, Jakarta, 1993, halaman 3

² Ari Pradhanawati & Tri Cahyo U, Pemilu dan Demokrasi, FISIP UNDIP & JALANMATA, Semarang, 2008, halaman 41

³ Respati & Afrosin Arif, Mengawal Demokrasi Dinamika PILKADA, Iskra Publisher, Solo, 2006, halaman 24.

⁴ UUD 1945, Pasal 18 bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara demokratis.

Partisipasi bukan hanya *vote*, tapi juga *voice*. Partisipasi bukan hanya masalah keterlibatan publik untuk memberikan pilihan (*vote*) namun lebih menekankan pada penyampaian aspirasi (*voice*) dan mendiskusikannya secara berkualitas.⁵ Pemilukada secara langsung adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong partisipasi rakyat yang merupakan rintisan jalan menuju pembangunan pertanggungjawaban otonomi daerah.

Periode ke periode pemilukada langsung yang telah diselenggarakan Kabupaten Grobogan, jumlah partisipasi masyarakatnya cenderung labil. Dari periode ke periode Pemilukada Kabupaten Grobogan selalu menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari pada Pemilukada Jawa Tengah.

Sejak tahun 2005 pemilukada langsung digelar di Indonesia, dan Kabupaten Grobogan menyelenggarakan pemilukada langsung pertamanya pada tahun 2006, angka partisipasi pemilih pada pemilukada tingkat kabupaten dari tahun 2006 dan 2011 tidak lebih dari 70%, dan bahkan angka partisipasi pemilih pada pemilukada tingkat Jawa Tengah malah lebih rendah, hanya 50,64% di tahun 2008 dan 46,15% di periode 2013. Jumlah DPT di Kabupaten Grobogan diantara Daerah Pemilihan Jateng 3 (Dapil 3) adalah

paling tinggi. Namun, partisipasi pemilih dalam pemilukada ditingkat kabupaten yang terselenggara di masing-masing daerah dalam Dapil 3 yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Grobogan adalah paling rendah yaitu 69,85% pada Pilbup 2006 dan 67,72% pada Pilbup periode 2011.⁶

Selain itu, juga dapat dilihat angka partisipasi pemilih dalam Pemilukada Jawa Tengah yang diselenggarakan di tahun 2008, di Kabupaten Grobogan menunjukkan angka partisipasi yang lebih tinggi dari pada partisipasi pemilih pada pemilukada Jawa Tengah periode 2013, namun semua angka partisipasi memilihnya tidak lebih tinggi dari angka partisipasi Pemilukada Kabupaten yang padahal jumlah DPT nya lebih sedikit. Terdapat selisih yang signifikan jika dibandingkan antara jumlah partisipasi pemilih pada Pemilukada Kabupaten Grobogan 2011 yaitu 67,72% dengan Pemilukada Jawa Tengah 2013 yang hanya 46,15%.

Dilihat dari data diatas, disinilah yang membuat penulis tertarik untuk melihat dan meneliti serta membandingkan bagaimana keterlibatan, kondisi, dan dinamika partisipasi pemilih di Kabupaten Grobogan, dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan 2011 dan Pemilukada Jawa Tengah 2013.

⁵ Rohman, Ainur, Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan, Malang, ; Averroes Press, 2009, halaman 35

⁶ KPU Provinsi Jawa Tengah

KERANGKA TEORI

1. Perilaku Memilih dalam Pemilukada

Perilaku memilih adalah tindakan warga negara biasa, bukan elit, dalam ikut serta dalam memilih orang, partai politik, atau isu publik tertentu. Secara khusus, perilaku memilih adalah partisipasi dalam pemilu (baik nasional maupun pemilukada), pilihan atas partai politik tertentu, pilihan atas calon untuk jabatan politik tertentu, dan pilihan atas isu publik tertentu.

Di dalam perilaku memilih, terdapat dua teori pokok yang harus dipahami, yaitu⁷ : (1) Perilaku memilih rasional, perilaku memilih ini notabene disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal pemilih. Sehingga pemilih, disini berkedudukan sebagai makhluk yang independen, memiliki hak bebas untuk menentukan memilih partai atau kandidat manapun. Dan sebagian besar, pendasaran mereka berasal dari internal pemilih sendiri, hasil berpikir dan penilaian terhadap objek politik tertentu. (2) Perilaku memilih emosional, untuk perilaku memilih ini, lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan. Seperti faktor sosiologis, struktur sosial, ekologi, maupun sosiopsikologi.

7

<http://www.teoriumumperilakumemilih.html>
. Di unduh pada tanggal 26 Desember 2013, Jam 21.35 WIB

2. Partisipasi Politik

Menurut Sastroadmodjo, partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.⁸

.Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik :

- Figur
Figur ideal kepala daerah merupakan gambaran ideal pemilih terhadap seorang calon kepala daerah yang dianggap layak, kompeten untuk menduduki jabatan. Oleh karena itu, figur ideal memiliki kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penilaian masyarakat menjadi dasar bagi sebuah calon kepala daerah apakah dirinya memenuhi syarat atau tidak. Mencari figur ideal pada dasarnya merupakan upaya menemukan seorang pemimpin yang ideal/sempurna.⁹

⁸ Arif Saiful, *Demokratisasi Sistem Politik & Pemerintahan*, Malang, Averroes Press, 2011, halaman 35.

⁹ Utomo Susilo, *Persepsi Masyarakat Terhadap Figur Ideal Walikota Semarang*, Semarang, Laporan Penelitian, 2010, Halaman 12

- Pemilukada Tingkat Kabupaten/Kota dan Pemilukada Tingkat Provinsi
- Pemilukada Kabupaten/Kota adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati & Walikota dan Wakil Walikota.
- Pemilukada Provinsi adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung yang ada di tingkat provinsi untuk memilih kepala daerah yang mempunyai tugas memimpin provinsi yang disebut Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan dua hal yang menentukan arah bagi setiap lembaga, atau bahkan individu. Di dalamnya terdapat cita-cita. Visi dan misi calon kepala daerah dari tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi tentunya sangat berbeda walau mungkin programnya sama, namun untuk cakupan dari janji yang ada dalam visi misinya pastilah berbeda. Disini masyarakat melihat, janji manakah yang lebih berdampak langsung bagi mereka.

METODOLOGI PENELITIAN

Disini peneliti menggunakan tipe penelitian survei yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan sekelompok obyek (Populasi). Lalu untuk membandingkan atau menganalisis hubungan anatar variabel-variabel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial, karena dilakukan pada sample yang diambil secara random. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *multistage*, yaitu teknik pengambilan sampel secara bertahap berdasarkan kerangka *sampling*.¹⁰ Tahap pertama, dibagi kerangka populasi berdasarkan 3 (tiga) kategori tingkat partisipasi, yaitu 1) partisipasi rendah, 2) partisipasi sedang, dan 3) partisipasi tinggi, untuk menentukan kerangka sampling dan besaran sample (*sample size*) penelitian.

Klasifikasi Berdasar TingkatPartisipasi

N	Kategori	Kecamatan	Tingkat partisipasi (%)
0			

¹⁰ Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, halman 79.

1	Partisipasi rendah	Karangrayung	62,52
		Penawangan	63,58
		Godong	63,55
		Kedungjati	64,29
		Tanggungharjo	64,34
2	Partisipasi sedang	Toroh	66,83
		Geyer	66,73
		Pulokulon	68,36
		Kradenan	69,75
		Gabus	67,46
		Klambu	70,02
		Wirosari	68,31
		Tawangharjo	69,96
		Grobogan	69,43
		Gubug	64,55
Tegowanu	68,46		
3	Partisipasi tinggi	Purwodadi	72,99
		Brati	71,74
		Ngaringan	72,94

Sampling Fraction

No	Kecamatan	Jumlah Sub Populasi	%	Jml h sampel
1	Purwodadi	99.617	42,66	43
2	Wirosari	68.180	29,20	29
3	Godong	65.712	28,14	28
	Jumlah	233.509	100,00	100

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alasan individu berperilaku dengan karakteristik tertentu dapat dilihat dari faktor internal (inheren), seperti; usia, jenis kelamin, agama, asal kecamatan, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan. Adapun alasan

tidak ikut memilih terbagi antara alasan administrasi dan teknis atau individual. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin, di kalangan laki-laki, perilaku memilih dan partisipasi politik lebih banyak terjadi karena alasan teknis/individual, sementara di kalangan perempuan perilaku memilih dan partisipasi politik lebih banyak terjadi karena alasan administratif, yakni sekedar tidak lebih melaksanakan hak-hak kionstitusional yang melekat padanya.

Dari segi pendidikan, di kalangan orang yang berpendidikan tinggi, cukup besar proporsi pemilih yang terjadi akibat alasan-alasan politis seperti ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Pemilukada dan dilihat dari pekerjaan, orang yang basis pekerjaannya adalah harian (seperti tukang ojek, membuka warung, pedagang keliling dan sebagainya), sebagian besar perilaku memilihnya lebih rendah karena alasan teknis, yaitu kelompok pekerjaan ini tidak mau kehilangan kesempatan ekonominya apabila dirinya terpaksa melakukan pemilihan di TPS. Sementara untuk kategori jenis pekerjaan lain, sebagian besar perilaku memilih dan partisipasi politik terbagi antara alasan administrasi dan teknis/individual.

Pada penelitian, fenomena golput baik pada Pilbup 2011 dan Pilgub 2013 dapat dikatakan sangat kecil, karena dari 100 responden, 3 persen Golput di Pilbup 2011 dan 7 persen Golput di Pilgub 2013.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Grobogan, ketika Pemilukada Bupati 2011 dan

Pemilukada Gubernur 2013, maka ditemukan beberapa simpulan bahwa variabel tingkat pendidikan, jenis kelamin dan asal kecamatan berpengaruh terhadap perilaku memilih seseorang. Gejala yang tampak di masyarakat, ketika dilakukan wawancara dengan beberapa responden adalah adanya kecenderungan bahwa faktor asal kecamatan dan desa menjadi salah satu determinan penting yang melatarbelakangi seseorang untuk berperilaku memilih sehingga akhirnya dirinya datang ke TPS.

Pada kasus penelitian, Bupati *incumbent* selama ini dapat dikategorikan sebagai figur pemimpin yang mampu menampung pluralitas. Pada kasus penelitian, Bupati *incumbent* selama ini dapat dikategorikan sebagai figur pemimpin yang mampu menampung pluralitas.

Selain beberapa hal tersebut, tentu masih banyak faktor nonteknis yang menyebabkan tingginya partisipasi politik masyarakat Kabupaten Grobogan pada Pilbup 2011 dan Pilgub 2013. Misalkan karena bertepatan dengan hari libur nasional, sehingga warga masyarakat memiliki waktu cukup banyak untuk hadir ke TPS, dan lebih memilih aktif dalam proses keterlibatan politik, walaupun akurasi pilihan warga masyarakat belum tentu menjamin keberhasilan keputusannya dalam memilih pemimpin (Bupati dan Gubernur) yang tepat dan amanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa mayoritas responden memiliki

perilaku memilih lebih besar pada Pilbup 2011 yaitu 72%, sedangkan pilgub 2013 hanya 44%. Hal tersebut disebabkan karena Pilbup lebih *direct* menyangkut kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan. Perbedaan tingkat partisipasi memilih pada Pilbup 2011 dengan Pilgub 2013 juga dapat dilihat dari faktor *proximity*, selain itu sebesar 47% responden beralasan menggunakan hak pilihnya dalam Pilbup 2011 karena tertarik pada figur kandidat dan sebanyak 18% karena anjuran tokoh agama/masyarakat.

Peneliti menyimpulkan bahwa ada perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada bupati dan pemilukada gubernur. Dilihat dari beberapa variabel, yakni dari tingkat pendidikan, alasan administratif tidak terdaftar di DPT, figur kedekatan calon pilbup dan pilgub, serta asal daerah desa atau kecamatan.

Saran yang disampaikan peneliti adalah sebagai berikut : (1) Pemilih hendaknya tahu dan kenal dengan betul siapa calon kepala daerah yang akan dipilihnya dalam pemilukada, serta tahu bagaimana *track record* dari kandidat calon kepala daerah, jadi tidak hanya memilih berdasarkan siapa yang memberi uang, karena suara mereka dalam TPS yang hanya 5 menit menentukan nasib kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu 5 tahun. (2) Selain itu badan penyelenggara Pemilu yaitu KPU tingkat kabupaten harus benar-benar memberikan sosialisasi kepada masyarakat sampai ke pedalaman,

sehingga merata pengetahuan tentang arti pentingnya pesta demokrasi rakyat, serta memberikan penyuluhan tentang bagaimana kandidat calon kepala daerah dengan baik dan terbuka. (3) Dukungan dari segala elemen baik dari keluarga, kerabat, lingkungan tempat tinggal, para tokoh masyarakat, dan tentunya pemerintah harus lebih memberikan pendidikan

politik agar dapat meningkatkan peran serta partisipasi memilih masyarakat. Selain itu juga fasilitas pendukung dari pemerintah juga harus tersedia agar tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya semakin baik, salah satu contoh memberikan kendaraan atau transportasi massal menuju ke TPS utk masyarakat yang rumahnya jauh dari TPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Pradhanawati & Tri Cahyo U, (2008) *Pemilu dan Demokrasi*, FISIP UNDIP & JALANMATA, Semarang.
- Arif Saiful, (2001), *Demokratisasi Sistem Politik & Pemerintahan*, Malang, Averroes Press.
- <http://www.teoriumumperilakuemilih.html> . Di unduh pada tanggal 26 Desember 2013, Jam 21.35 WIB
- Jalaluddin Rakhmat, (2009), *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- KPU Provinsi Jawa Tengah
- Respati & Afrosin Arif, (2006) *Mengawal Demokrasi Dinamika PILKADA*, Iskra Publisher, Solo.
- Rohman, Ainur, (2009), *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*, Malang, ; Averroes Press.
- Suprayitno, (1993), *Pemilu Indonesia dari Masa ke Masa*, PT. Teguh Pratiwi Mandiri, Jakarta.
- Utomo Susilo, (2010), *Persepsi Masyarakat Terhadap Figur Ideal Walikota Semarang*, Semarang, Laporan Penelitian
- UUD 1945, *Pasal 18* bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara demokratis.